

KOMCAD ASN dalam Sorotan: Antara Kesiapsiagaan dan Kepercayaan Publik

DITUJUKAN KEPADA: KEMENTERIAN PERTAHANAN, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH

Mayahayati Kusumaningrum, Joana Kriskinantyas Rahayu, & Novi Prawitasari
 (Analisis Kebijakan – PUSJAR SKPP LAN)

EXECUTIVE SUMMARY

Kebijakan pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Komponen Cadangan (KOMCAD) merupakan bagian dari upaya penguatan sistem pertahanan negara melalui partisipasi warga sipil. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan 4.000 ASN untuk mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama lebih kurang 45 hari. Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, implementasi kebijakan ini memunculkan berbagai persoalan baik dari sisi substansi, implementasi, maupun persepsi publik. Rendahnya minat awal ASN, dominasi sentimen negatif dalam persepsi publik mencerminkan kekhawatiran terhadap aspek beban tambahan, paksaan, ketidakjelasan peran sipil dan militer, serta transparansi anggaran terhadap program ini. Policy brief ini menawarkan perlunya penyesuaian strategis terhadap kebijakan KOMCAD bagi ASN. Solusi ini terbagi menjadi jangka pendek dan menengah, antara lain penegasan indikator kinerja, segmentasi sasaran pada sektor strategis serta penguatan narasi kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif, penguatan kapasitas bela negara berbasis sipil yang terintegrasi dalam sistem pengembangan kompetensi ASN (Latsar) dan pelatihan tematik lainnya. Selain itu, perlu penguatan transparansi anggaran dan mekanisme evaluasi program untuk meningkatkan kepercayaan publik.

PENDAHULUAN

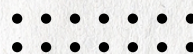
Memasuki bulan April, kita diingatkan kembali pada Agenda besar pelaksanaan Komponen Cadangan (KOMCAD) untuk para ASN yang sebelumnya ramai dibicarakan akan dilaksanakan di bulan April 2026 ini. Meskipun banyak komentar pro dan kontra yang ramai di media sosial, sebanyak 2.109 ASN dari 49 kementerian dan Lembaga telah mulai mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (KOMCAD) Gelombang I (idntimes.video, 2026).

APA ITU KOMCAD? Menurut UU 23/2019, merupakan sumber daya nasional (baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan) yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen utama (TNI). KOMCAD diperlukan bukan hanya untuk menambah personel pertahanan, namun menjawab perubahan karakter ancaman dan keterbatasan sumber daya pertahanan.



Serupa dengan KOMCAD, sejumlah negara juga memiliki tentara cadangan yang dibentuk untuk mempertahankan negara saat perang dan bencana nasional. Misalnya di Amerika Serikat yang memiliki National Guard dan berperan penting selama proses penanggulangan bencana, Singapura dan Korea Selatan yang mewajibkan warga negaranya menjalani wajib militer (tempo.co, 2021), serta Taiwan yang telah menyertakan latihan warga sipil perkotaan ke dalam latihan militer tahunannya (ipdefensforum.com, 2025).





Di Indonesia, KOMCAD telah dijalankan sejak 2021, dan hingga 2025 program ini sudah terlaksana pada Kementerian Pertahanan dengan jumlah sekitar 1.333 personel (kompas.id, 2026). Pelaksanaan KOMCAD ini dilaksanakan berdasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 dan Permenhan Nomor 3 tahun 2021. Pelaksanaan KOMCAD dilakukan terhadap warga negara (masyarakat sipil termasuk di dalamnya ASN, swasta, mahasiswa dan lainnya). Di tahun 2026 ini, skenario dengan menargetkan 4000 ASN mengikuti KOMCAD mencuat dan menjadi ramai dibicarakan.



"Kita berharap bisa menjadikan seluruh ASN KOMCAD, Tahap awal ini kita akan mulai dengan 4.000 ASN dari 49 kementerian dan lembaga" – Wamenhan, Donny Ermawan Taufanto, 2026

Surat Menteri PANRB Nomor B/22/M.SM.00.00/2026 menjadi dasar keikutsertaan ASN dalam KOMCAD sebagai bagian dari Bela Negara. Selanjutnya ASN yang lulus seleksi wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama ±45 hari, tetap menerima gaji dan tunjangan, serta memperoleh bobot 300 JP sebagai bagian dari pengembangan kompetensi sesuai PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

Sejumlah pihak mewanti-wanti keberlangsungan KOMCAD. Anggota Komisi I DPR RI menekankan bahwa pelatihan Komcad tidak boleh mengaburkan prinsip netralitas ASN (gesuri.id, 2026). Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bahkan menyatakan bahwa program KOMCAD tidak sejalan dengan penguatan fungsi tugas dan peran ASN dan justru menambah beban fiskal negara (kompas.id, 2026). Dari sisi Pemerintah Daerah, meskipun pada dasarnya mendukung program ini, namun dihadapkan pada belum tersedianya anggaran (diskominfomc.kalselprov.go.id, 2026; polkam.go.id, 2025). Meski secara normatif kebijakan ini memiliki landasan hukum dan semangat bela negara, kondisi di lapangan perlu menjadi perhatian serius agar ke depannya pelaksanaan KOMCAD bagi ASN dapat berjalan efektif.

DESKRIPSI MASALAH



1 Ambiguitas Tujuan Kebijakan

UU Nomor 23 Tahun 2019 menyebutkan bahwa anggota KOMCAD selama masa aktif tunduk pada hukum militer. Padahal pemisahan antara sipil dan militer telah diamanatkan dalam reformasi sejak tahun 1998 (kompas.id, 2026). Konsultan Marapi Consulting & Advisory bahkan menyampaikan bahwa mengalihkan ASN ke peran pertahanan berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik (kompas.id, 2026). Direktur Eksekutif Imparsial mempertanyakan urgensi KOMCAD, dan menyoroti kemungkinan alokasi anggaran terbuang, tidak efisien, dan tidak terlalu kontributif pada penguatan sektor pertahanan (tirto.id, 2026).



2 Ketidakesesuaian Karakter Sipil ASN dengan Pendekatan Militer

Hidayat (2022) memandang kebijakan KOMCAD bagi ASN kurang relevan, karena ASN telah dibekali dengan wawasan kebangsaan dan materi bela negara saat mengikuti prajabatan. Lebih lanjut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia mengkhawatirkan jika KOMCAD akan menanamkan kultur kekerasan dalam birokrasi dan masyarakat (kompas.id, 2026). Ditambah lagi, salah satu ilmu pertahanan yang diajarkan adalah teknik dasar mengoperasikan senjata api seperti menembak (tempo.co, 2026). Padahal, secara jelas tersemat kata "sipil" pada penamaan ASN. Praktik ASN yang seakan-akan berubah menjadi militer ini mengingatkan pada masa Orde Baru, dimana ASN tidak hanya dilatih sebagai "pamong praja" namun juga dilatih secara militer, dan telah lama dikritik sebagai tindakan yang bernuansa militeristik (Umra dalam Suwartono, 2025).

3 Potensi Distraksi dari Agenda Reformasi Birokrasi

KontraS menyebut bahwa KOMCAD bagi ASN merupakan militerisasi sipil dan tidak selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Sehingga yang dibutuhkan adalah reformasi birokrasi menyeluruh dengan pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan inklusif (jawapos.com, 2026). Direktur Imparsial bahkan menyatakan bahwa kebijakan KOMCAD ini berdampak pada normalisasi kehadiran militer di ruang sipil (rm.id, 2026). KontraS dan Imperial juga menilai kebijakan ini berpotensi mengganggu profesionalisme ASN serta tatanan demokrasi (magdalene.co, 2026). Lebih jauh, legitimasi ASN lahir dari kepercayaan publik yang tumbuh melalui empati, komunikasi yang setara, dan profesionalisme melayani, dan jika gaya militeristik tampil dominan dalam pelayanan publik, maka akan mengancam citra birokrasi dan kualitas demokrasi itu sendiri (harianbhirawa.co.id, 2026).

4 Rendahnya Minat Awal ASN

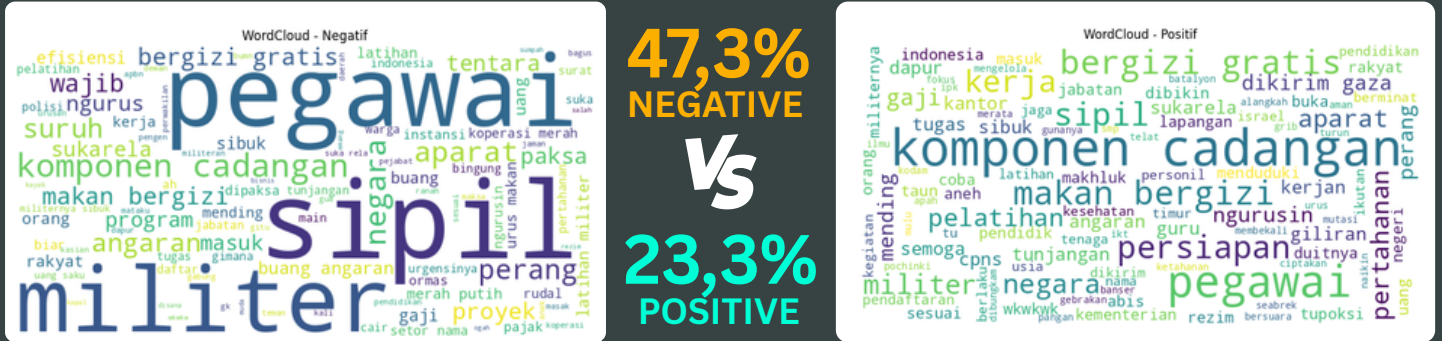
Rendahnya minat ASN untuk ikut pada pelatihan KOMCAD terlihat dari hasil kajian Wahyu dkk (2022) dimana dari total ASN yang memenuhi syarat sebanyak 1.201.981, jumlah ASN yang mendaftar sebagai KOMCAD hanya sebanyak 652 ASN, artinya tingkat partisipasi hanya sebesar 0,054%. Beragam komentar bernada pesimis juga ditemukan di media sosial Instagram sepanjang akhir Februari hingga Maret 2026.

“...Masuk sistem merit/ Manajemen Talenta saja tidak. Benahi dulu SPBE/ pemda & regulasi antar lintas K/L/PD agar bisa sinkron” - (pengguna instagram)

“Orang wajibnya cuma 20 JP ngapain sampe 300 JP, overclaim juga ga ada dampak apa-apa” - (pengguna instagram)

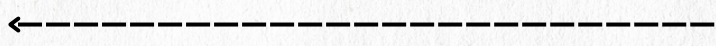
“..tanpa paksaan, tapi kenyataannya ada penunjukkan, dan disuruh menyeter nama, dan harus membuat surat pernyataan sukarela”. (pengguna instagram)
“..sukarela tapi memaksa kuota instansi harus terpenuhi..”(pengguna instagram)

5 Persepsi Publik dan Risiko Polarisasi



Visualisasi wordcloud didapatkan dari 486 komentar instagram. Istilah “Komponen Cadangan” muncul di kedua spektrum, narasi negatif lebih menonjol karena adanya persepsi “pertukaran peran”. Jarak yang lebar antara narasi “beban paksaan” dan “bela negara” ini menunjukkan adanya defisit kepercayaan publik yang serius. Jika tidak dimitigasi, ketidakjelasan urgensi anggaran dan indikasi penunjukan wajib dapat memperdalam polarisasi antara pemerintah dan kelompok sipil, terutama di kalangan aparatur negara itu sendiri.

ALTERNATIF SOLUSI



01 Status Quo dengan Penyempurnaan Terarah

Alternatif ini mempertahankan kebijakan KOMCAD bagi ASN dengan melakukan penyempurnaan pada aspek desain dan implementasi. Penyempurnaan dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang terukur, penguatan integrasi antara pelatihan dasar kemiliteran dengan modul kepemimpinan dan manajemen birokrasi, serta pengembangan mekanisme tindak lanjut pasca pelatihan. Sinkronisasi hasil pelatihan (berbentuk JP) ke dalam sistem MyASN BKN dilakukan untuk memastikan kontribusi ASN dalam KOMCAD diakui sebagai poin pengembangan kompetensi yang berdampak nyata pada karier mereka.

Selain itu, diperlukan reframing narasi kebijakan dari yang semula dipersepsikan sebagai “militerisasi ASN” menjadi “penguatan kapasitas sipil dalam kondisi darurat”. Pendekatan ini penting untuk memperbaiki persepsi publik dan meningkatkan legitimasi kebijakan. Pemerintah juga perlu memberikan kepastian perlindungan status hukum sipil bagi ASN selama masa aktif, guna menghindari ambiguitas antara hukum militer dan kode etik ASN yang menjadi kekhawatiran.

02 Segmentasi Sasaran Sektor

Penyempurnaan juga perlu dilakukan melalui segmentasi sasaran. KOMCAD sesuai aturannya menyasar warga sipil, termasuk ASN, dan warga sipil lainnya pada batas usia tertentu. Implementasi bagi ASN sebaiknya dibuat prioritas. Pada Prioritas I difokuskan pada sektor-sektor strategis yakni yang memerlukan respon cepat dan perlindungan publik, seperti penanggulangan bencana, pemadam kebakaran, penegakan peraturan daerah (Satpol), layanan kesehatan (darurat), dan keamanan siber (IT), sehingga lebih relevan dengan kebutuhan nasional dan kompetensi ASN. Selanjutnya sasaran pelaksanaan KOMCAD ASN di sektor lain seperti pencegahan dan penguatan kapasitas sebagai Prioritas II.

03 Reorientasi Pelatihan ke Model Bela Negara Non-Militer

Alternatif ini menekankan pergeseran pendekatan dari pelatihan semi-militer menuju penguatan kapasitas bela negara berbasis sipil. Secara substantif, materi bela negara dan kesiapsiagaan sebenarnya telah terintegrasi dalam Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS, khususnya pada Agenda I. Oleh karena itu, penguatan dapat dilakukan dengan memperluas cakupan materi yang sudah ada, seperti manajemen krisis, keamanan siber, disiplin berbasis kinerja, serta penguatan budaya kerja dan manajemen kinerja. Pendekatan ini dapat difasilitasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) maupun Kementerian Pertahanan.

Reorientasi ini juga menjadi solusi atas durasi pelatihan KOMCAD yang relatif panjang (± 45 hari), sehingga tujuan peningkatan disiplin dan kesiapsiagaan ASN dapat dicapai secara lebih efisien tanpa mengganggu tugas utama pelayanan publik. Guna meredam risiko polarisasi dan menjaga profesionalisme, pendekatan ini harus mengedepankan asas sukarela dengan menghapuskan sistem penetapan kuota per unit kerja yang kerap kali memicu penunjukan paksa di lapangan. Lebih lanjut, desain kebijakan perlu melibatkan ASN, akademisi, dan sektor swasta sebagai co-creator dalam penyusunan materi, serta melibatkan pihak independen sebagai evaluator. Pendekatan ini bertujuan untuk menggeser posisi publik dari sekadar objek menjadi aktor dalam proses kebijakan.

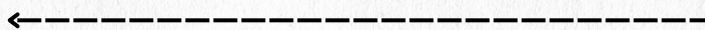


04 Transparansi Anggaran dan Evaluasi Program

Alternatif ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program KOMCAD. Mengingat isu anggaran menjadi salah satu perhatian utama dalam persepsi publik, pemerintah tepatnya Kemenhan perlu menyediakan informasi secara terbuka terkait alokasi biaya, *output* dan *outcome* yang ditargetkan, serta capaian program secara berkala.

Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme evaluasi yang sistematis dan terbuka untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak program. Evaluasi ini juga mencakup audit terhadap proses rekrutmen untuk memastikan tidak adanya praktik intimidasi administratif dalam pengumpulan nama peserta. Evaluasi ini dapat melibatkan lembaga independen guna meningkatkan kredibilitas hasil penilaian. Pendekatan transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menjadi dasar perbaikan kebijakan secara berkelanjutan (*evidence-based policy making*).

REKOMENDASI



Berdasar berbagai permasalahan dan alternatif solusi tersebut, pemerintah perlu melakukan penyesuaian strategis terhadap kebijakan KOMCAD bagi ASN dengan menekankan keseimbangan antara tujuan pertahanan negara dan prinsip profesionalitas sipil. **Dalam jangka pendek**, disarankan untuk melakukan penyempurnaan kebijakan melalui penegasan indikator kinerja, segmentasi sasaran pada sektor strategis serta penguatan narasi kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif. Hal ini untuk menekan tingginya resistensi publik. **Dalam jangka menengah**, diperlukan reorientasi pendekatan pelatihan dari model semi militer ke penguatan kapasitas bela negara berbasis sipil yang terintegrasi dalam sistem pengembangan kompetensi ASN (Latsar) dan pelatihan tematik lainnya. Selain itu, perlu penguatan transparansi anggaran dan mekanisme evaluasi program untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian keberhasilan kebijakan KOMCAD bagi ASN ini akan lebih berhasil bila selaras dengan karakter sipi ASN, kebutuhan birokrasi modern serta persepsi dan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2024). Buruk Keamanan Siber di Indonesia Akibat Ego sektoral. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240627100303-20-1114729/buruk-keamanan-siber-di-indonesia-akibat-egosektoral>
- Humas Polri. (2026). Waspada Pandemi Kejahatan Siber, Polrestabes Medan Ungkap Data Mengejutkan dan Ajak Warga Perketat Keamanan Digital. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2252762-waspada-pandemi-kejahatan-siber-polrestabes-medan-ungkap-data-mengejutkan-dan-ajak-warga-perketat-keamanan-digital>
- Media Indonesia. (2025). Ini Tren Ancaman Siber 2025, Dari Ransomware hingga Deepfake. https://mediaindonesia.com/teknologi/825592/ini-tren-ancaman-siber-2025-dari-ransomware-hingga-deepfake?utm_source=copilot.com
- Telkom University. (2025). Security by Design: Strategi Membangun Perangkat Lunak yang Aman Sejak Awal. <https://bse.telkomuniversity.ac.id/f09f9492-security-by-design-strategi-membangun-perangkat-lunak-yang-aman-sejak-awal/>